

PERSEPSI DAN EKSPEKTASI PEMBANGUNAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DAN PERUSAHAAN MIGAS

Erwiantono^{*)} dan Qorih Saleha

Laboraturium Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Perikanan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman, Samarinda 75119, Indonesia

^{*)}E-mail: ewin_bebek@yahoo.com

Abstrak

Desa Saliki, sebagai bagian dari ekosistem Mahakam Delta yang unik, memiliki sejumlah masalah pembangunan. Kawasan ini memiliki simpanan minyak dan gas yang ditambang oleh berbagai perusahaan multinasional. Sektor ini memberikan kontribusi yang besar untuk pendapatan nasional. Daerah ini juga memiliki hutan bakau, yang mendorong masyarakatnya untuk membuat tambak udang yang luas. Sejak tahun 1999, pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara telah mengadakan sebuah program pemberdayaan bernama Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai), yang dilanjutkan dengan Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera). Sejumlah perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di daerah ini juga mengadakan berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, terdapat sejumlah masalah pemberdayaan yang penting seperti tidak adanya kebutuhan yang dirasakan (*perceived needs*) akan perlunya pemberdayaan masyarakat dan juga belum ditetapkannya peran penggerak utama untuk keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat.

Perceptions and Expectations of Community Development for Local Government and Oil and Gas Companies

Abstract

Saliki Village, as part of a unique ecosystem of the Mahakam Delta, has various development problems. This region contains oil and gas deposits, which have been mined by multinational companies. This sector has given significant contribution to national income. This area is also covered by mangrove forest that encourages the community to open extensive shrimp ponds. Since 1999, the local government of Kutai Kartanegara has launched a specific development program called Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai), continued with Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera). Oil and gas companies operating in the region have also launched various community development programs as their corporate social responsibility. However, the lack of community's development perceived needs and unestablished prime mover role to hold the community's economic sustainability have become significant development problems.

Keywords: development, district government, multinational oil gas company, Saliki village

1. Pendahuluan

Sebagaimana desa-desa di wilayah Delta Mahakam, Desa Saliki memiliki ekosistem khas yang terbagi atas dua bagian wilayah yaitu wilayah daratan yang bersatu dengan pulau induk Kalimantan dan wilayah pulau-pulau yang terbentuk sebagai proses sedimentasi muara sungai selama ribuan tahun. Ekosistem delta di wilayah desa ini memiliki potensi sumberdaya yang bernilai

ekonomi tinggi seperti eksploitasi sumberdaya minyak dan gas bumi (migas) yang dioperasikan perusahaan migas asing sejak periode 1970-an. Kegiatan eksploitasi migas ini memiliki peran yang sangat penting secara nasional karena merupakan sektor utama penyumbang devisa negara. Masalah yang dihadapi oleh sektor ini adalah keniscayaan bahwa kegiatan penambangan harus berhenti pada waktu tertentu karena sifatnya yang tidak terbarui.

Kegiatan lain yang berperan dominan adalah usaha tambak udang rakyat dengan pola ekstensif-tradisional. Kegiatan tambak ini dilakukan dengan mengkonversi hutan mangrove yang mencapai puncaknya pada pertengahan sampai akhir 1990-an setelah Indonesia mengalami krisis moneter. Hal ini disebabkan karena daya tarik finansial dari usaha tambak dan minimnya pilihan bekerja yang prospektif bagi masyarakat di desa ini. Permasalahan yang dihadapi sektor ini adalah penurunan produktivitas dan kegagalan produksi usaha tambak karena masalah degradasi ekosistem yang semakin kompleks.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 1999 melalui Program Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai, atau yang dikenal dengan Program Gerbang Dayaku berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Periode pertama (1999-2004) difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana fisik sebagai modal dasar pembangunan. Pada periode kedua (2005-2010) Program Gerbang Dayaku fokus pada aspek pemberdayaan pemerintahan daerah dan penegakan supremasi hukum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi yang dilaksanakan dengan meningkatkan pembangunan teritorial pedesaan dan perkotaan. Program Gerbang Dayaku ini kemudian dilanjutkan dengan Program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja) dengan titik tekan jaminan pemenuhan hak hidup dasar yang lebih bermutu dan maju serta berkeadilan, penegakan hukum dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak.

Perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Desa Saliki dan sekitarnya juga berinisiatif melakukan kegiatan pengembangan masyarakat sebagai wujud dari penunaian tanggung jawab sosial perusahaan. Program pengembangan masyarakat yang dilakukan berbentuk program bantuan pengadaan fasilitas kebutuhan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan serta insiasi pengembangan wirausaha terhadap kelompok masyarakat.

Permasalahan mendasar dan aktual di Desa Saliki adalah ketertinggalan pembangunan yang cukup tajam dan minimnya sektor usaha yang berperan sebagai *prime mover role* ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan minimnya sarana dan prasarana fisik pembangunan dan rendahnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat serta tingginya pengangguran/dominannya sektor usaha informal. Sementara di sisi lain, berkembang opini masyarakat bahwa eksploitasi sumberdaya alam migas di wilayah desa mereka yang bernilai ekonomi tinggi seharusnya ikut mensejahterakan dan berperan aktif dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Permasalahan di atas perlu diantisipasi, sehingga ekosistem delta Mahakam dapat dimanfaatkan secara bersama dan berkelanjutan serta di sisi lain kehidupan masyarakat dapat berkembang secara maju dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dasar yang berkaitan dengan permasalahan pembangunan di Desa Saliki yaitu: (1) mengetahui persepsi masyarakat terhadap aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara dan perusahaan migas yang beroperasi di wilayah tersebut dan (2) mengetahui ekspektasi dan permasalahan pembangunan yang dirasakan masyarakat terhadap Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara dan perusahaan migas yang beroperasi di wilayah tersebut

Persepsi secara sederhana diartikan sebagai pemaknaan hasil pengamatan terhadap sesuatu obyek. Persepsi juga dapat diartikan sebagai pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 1998). Sedangkan menurut Atkinson dan Hilgard (1991) persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan.

Sebagai suatu cara pandang, persepsi termasuk proses psikologis yang timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus itu masuk ke dalam otak, disini stimulus diartikan, ditafsirkan dan diberi makna melalui proses yang kompleks baru kemudian dihasilkan persepsi dan apabila dibutuhkan akan dilengkapi dengan informasi yang tersimpan sebelumnya (*closure*) (Atkinson dan Hilgard, 1991). Mekanisme pembentukan persepsi menurut tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Litterer dalam Asngari, (1984) yakni melalui tiga mekanisme pembentukan yaitu *selectivity*, *closure* dan *interpretation*. Informasi yang sampai kepada seseorang menyebabkan individu membentuk persepsi. Informasi tersebut diseleksi dan kemudian disusun menjadi kesatuan yang bermakna, dan akhirnya terjadilah interpretasi dan informasi itu secara menyeluruh. Asngari (1984) mengemukakan bahwa walaupun seseorang hanya mendapat bagian-bagian informasi yang terpisah dan tidak lengkap, orang tersebut akan cepat menggunakan informasi-informasi tersebut untuk disusun menjadi suatu gambaran yang menyeluruh.

Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal atau disebut juga sebagai faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang berasal dari masa lalu seperti suasana emosional, latar belakang budaya dan kesiapan mental. Selain itu, kerangka rujukan (*frame of reference*) dapat mempengaruhi pembentukan persepsi melalui cara interpretasi perseptual terhadap suatu

objek. Faktor situasional berkaitan dengan sifat stimulus fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem individu.

Rakhmat (2000) menyatakan bahwa persepsi individu dibatasi oleh (1) perbedaan pengalaman, motivasi dan keadaan; (2) perbedaan kapasitas alat indera; (3) perbedaan pandangan, nilai dan kepercayaan. Ketiga perbedaan tersebut akhirnya menimbulkan perbedaan dalam memberikan makna terhadap stimuli, seperti kecenderungan mempersepsi apa yang sesuai dengan pandangan dan nilai, juga kebutuhan seseorang (*selective perception*), kecenderungan hanya menerima stimuli yang konsisten dengan pandangan, nilai dan kepercayaan (*selective exposure*), dan kecenderungan untuk mengingat pesan yang konsisten dengan pandangan, nilai dan kepercayaan (*selective retention*).

Kajian mengenai persepsi pembangunan diperlukan untuk mengotimalkan kualitas program pembangunan sesuai dengan persepsi dan ekspektasi masyarakat. Persepsi mengenai pembangunan yang mencakup harapan, aspirasi atau keinginan terhadap suatu kualitas program pembangunan sebaiknya dikaitkan dengan aspek-aspek psikologis dan sosiokultural masyarakat. Pandangan tersebut menyempurnakan pandangan pembangunan sebagai pencapaian dari aspek fisik semata (Harihanto, 2001).

Otonomi daerah dan desa sebagai salah satu konsep tata-pengaturan (*government system*) yang penting dalam sejarah politik pembangunan Indonesia. Dalam konsepnya, sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 secara eksplisit mengedepankan cita-cita untuk menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, kesejahteraan, menghargai prakarsa masyarakat lokal, memperjuangkan kemandirian serta kedaulatan sistem sosial ekonomi masyarakat lokal.

Konsep otonomi lokal daerah juga memberikan platform bagi sistem administrasi pembangunan yang memungkinkan setiap stakeholder mengaktualisasikan pencapaian cita-cita kesejahteraan sosial yang lebih baik serta keberlanjutan lingkungan secara aspiratif. Otonomi daerah memberikan landasan yang memadai bagi semua pihak untuk mengelola sistem pembangunan melalui proses perumusan kebijakan yang demokratis dan partisipatif, menghargai keberadaan semua pihak terutama komunitas lokal serta menghargai perbedaan pandangan dan pemutusan kebijakan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud tanggung jawab sosial dan moral perusahaan untuk berperan secara aktif dalam upaya-upaya pengembangan masyarakat secara luas. Dengan CSR, diharapkan terjadi interaksi dan kemitraan agar tercipta hubungan yang harmonis antara korporat, pemerintah dan terutama komunitas di wilayah korporat tersebut beroperasi. Hal ini akan membantu korporat

meningkatkan citra, layanan jasa serta kemampuan mengelola berbagai persoalan-persoalan yang timbul sebagai dampak kegiatan yang berlangsung. *Community development* (CD) merupakan bentuk program investasi sosial yang merupakan bagian integral dari paradigma *good corporate governance* serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. CD adalah salah satu bentuk implementasi CSR yang berkonsentrasi dalam pemberdayaan dan pengembangan komunitas di sekitar perusahaan (Budimanta, 2004).

Dengan program CD, diharapkan perusahaan dapat berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi program CD tidak terlepas dari efektivitas dalam penentuan prioritas program yang mampu menjadi pemicu dalam percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan tersebut. Untuk itu, pembentukan forum komunikasi antar pemangku kepentingan adalah wadah penting dalam upaya memfasilitasi kesepakatan-kesepakatan dan hubungan yang harmonis antar pemangku kepentingan (Budimanta, 2004).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian studi kasus yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi antar unit-unit sosial berkenaan pada fase spesifik subyek penelitian (Arikunto, 2002). Pengambilan data lapangan dilakukan secara sistemik melalui kuesioner (kuantitatif) dan wawancara mendalam/*in-depth interview* (kualitatif). Selain itu riset ini disertai dengan diskusi kelompok fokus (*Focus Group Discussion*) dan pengamatan lapang untuk lebih memahami kondisi nyata yang terjadi dan kebutuhan pembangunan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Pengumpulan data data sekunder dilakukan dengan metode analisis dokumen. Penelitian dilakukan di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang terdaftar secara administratif sebagai penduduk Desa Saliki dan tidak memiliki keterkaitan pekerjaan langsung di bawah struktur organisasi pemerintah maupun perusahaan. Penentuan sampel menggunakan metode secara sengaja sesuai dengan keperluan kepenelitian (*purposive sampling*) sebanyak 40 orang di empat wilayah rukun tetangga di Desa Saliki.

3. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Mayoritas responden adalah golongan umur menengah/30-45 tahun (65%), berpendidikan menengah/SLTP-SLTA (57,5%), bekerja di bidang perikanan (57,5%),

berpendapatan antara Rp.500.000–Rp.1.000.000/bulan (55%) dan bukan tokoh masyarakat (87,5%) serta mayoritas berasal dari etnis Bugis (60%) (Tabel 1).

Pola komunikasi masyarakat dan perusahaan migas.

Secara umum, keterdedahan masyarakat terhadap keterdedahan komunikasi publik oleh pemerintah daerah berada dalam kategori rendah menuju sedang dan tinggi. Demikian pula terhadap aktivitas komunikasi dengan perusahaan migas data aktivitas penerimaan informasi tentang perusahaan menunjukkan

bahwa sebagian besar responden (82,5%) menerima informasi tersebut tidak langsung dari sumber manajemen perusahaan, tetapi melalui perantara. Sumber perantara pertama yang paling banyak digunakan perusahaan adalah tokoh masyarakat setempat (42,55%). Media cetak resmi yang dirilis oleh perusahaan bulanan sama sekali tidak digunakan sebagai sumber informasi oleh masyarakat dan belum ada responden yang memanfaatkan internet sebagai sumber penerimaan informasi tentang perusahaan (Tabel 2).

Tabel 1. Sebaran Responden berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi

Karakteristik	Kategori	Jumlah orang	Persentase
Umur	15-30 th	6	15
	30-45 th	26	65
	<45 th	8	20
	Jumlah	40	100
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah – Tamat SD	15	37,5
	Tamat SLTP -SLTA	23	57,5
	Tamat Perguruan Tinggi	2	5
	Jumlah	40	100
Jenis Pekerjaan	Bidang perikanan (tambak)	23	57,5
	Bidang perikanan & non perikanan	2	12,5
	Bidang non perikanan	12	30
	Jumlah	40	100
Tingkat Pendapatan	<Rp.500.000	13	32,5
	Rp.500.000 – Rp.1.000.000	22	55
	>Rp.1.000.000	5	12,5
	Jumlah	40	100
Status Sosial	Non Tokoh Masyarakat	35	87,5
	Tokoh Masyarakat Non Formal	2	5
	Tokoh Masyarakat formal	3	7,5
	Jumlah	40	100
Etnis asal	Bugis	24	60
	Banjar dan Kutai	15	32
	Lainnya	1	8
	Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 2. Sebaran Responden berdasarkan Keterdedahan terhadap Komunikasi Publik Pemda (PD) dan Perusahaan Migas (PM)

Keterdedahan komunikasi	Tingkat Keterdedahan (%)					
	Rendah		Sedang		Tinggi	
	PD	PM	PD	PM	PD	PM
Penerimaan informasi tentang lembaga	55	67,5	27,5	17,5	17,5	15
Pencarian informasi tentang lembaga	70	65	22,5	30	7,5	5
Penyampaian umpan balik kepada lembaga	75	85	15	2,5	10	12,5
Keterlibatan dalam perencanaan program pembangunan	75	67,5	10	17,5	15	15
Rataan	68,75	71,25	18,75	16,875	12,5	11,875

Sumber: Data Primer Diolah

Cara yang ditempuh perusahaan untuk bertemu dengan komunitas dan mengalirkan informasi secara langsung adalah dengan selalu didampingi oleh tokoh masyarakat atau aparat pemerintah. Target audiens yang dibidik kebanyakan (80%) adalah perwakilan masyarakat, bukan keseluruhan anggota masyarakat. Mayoritas responden (85%) juga menilai bahwa frekuensi pertemuan yang dilakukan perusahaan untuk menjalin komunikasi efektif dengan komunitas sangat minim yaitu kurang dari 3 kali setiap tahun. Responden menilai bahwa pertemuan tersebut bukanlah forum rutin dengan agenda utama untuk menjalin komunikasi dan membangun saling pengertian dalam pengertian yang tuntas dan lengkap, tetapi lebih banyak hanya memanfaatkan momen peringatan hari besar agama atau hari besar nasional.

Sebanyak 87,5% responden memiliki perilaku komunikasi mencari informasi tentang perusahaan kepada sumber lain di luar manajemen resmi dan 80% responden menjadikan aparat pemerintah sebagai sumber tujuan pencarian informasi secara tidak langsung. Tujuan utama responden mencari informasi tentang perusahaan adalah mengakses bantuan untuk

masyarakat (70%). Mayoritas responden (82,5%) menyampaikan umpan balik secara tidak langsung kepada perusahaan. Terdapat 72,5% responden menjadikan tokoh masyarakat sebagai saluran penyampaian umpan balik dan 80% responden merasa tidak puas dengan tanggapan yang diberikan perusahaan.

Persepsi masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah daerah dan perusahaan migas. Persepsi masyarakat terhadap program pembangunan Gerbang Dayaku yang dilakukan oleh Pemda Kukar dan program *Community Development* yang dilakukan oleh perusahaan migas terdiri dari tiga indikator yang diamati, masing-masing indikator tersebut, yaitu (a) Persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur, (b) Persepsi tentang pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia; (c) Persepsi tentang komunikasi publik pemerintah daerah dan perusahaan migas (Tabel 3-5).

Pemenuhan ekspektasi pembangunan masyarakat oleh pemerintah daerah dan perusahaan migas. Secara keseluruhan, hanya sedikit responden yang menyatakan

Tabel 3. Sebaran Responden berdasarkan Persepsi terhadap Pembangunan Infrastruktur oleh Pemda (PD) dan Perusahaan Migas (PM)

Aspek Persepsi terhadap Pembangunan Infrastruktur	Persepsi (%)					
	Negatif		Netral		Positif	
	PD	PM	PD	PM	PD	PM
Program pembangunan meningkatkan ketersediaan infrastruktur	45	67,5	27,5	22,5	27,5	10
Infrastruktur yang dibangun mampu menggerakkan roda ekonomi	45	60	22,5	22,5	32,5	17,5
Infrastruktur yang dibangun mampu mengurangi ketertinggalan fasilitas pembangunan.	60	67,5	12,5	20	27,5	12,5
Program pembangunan telah mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana.	62,5	62,5	22,5	22,5	15	15
Rataan	53,12	64,37	21,25	21,87	25,62	13,75

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 4. Sebaran Responden berdasarkan Persepsi terhadap Pengembangan Ekonomi dan SDM oleh Pemda (PD) dan Perusahaan Migas (PM)

Aspek Persepsi terhadap Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Manusia	Persepsi (%)					
	Negatif		Netral		Positif	
	PD	PM	PD	PM	PD	PM
Membuka kesempatan kerja	70	77,5	17,5	17,5	12,5	7,5
Meningkatkan kualitas SDM melalui layanan kesehatan	70	70	5	10	25	20
Meningkatkan kualitas SDM melalui layanan pendidikan dan pelatihan	62,5	70	17,5	15	20	15
Meningkatkan peluang berusaha / perekonomian lokal.	60	72,5	25	12,5	15	15
Rataan	65,625	72,5	17,375	13,75	18,125	14,375

Sumber: Data Primer Diolah

semua ekspektasi pembangunannya dipenuhi oleh pihak pemerintah daerah maupun perusahaan, sebagian yang lain menyatakan sebagian terpenuhi dan jumlah terbesar mengaku harapan mereka tidak terpenuhi (Tabel 6).

Kebutuhan Pembangunan Masyarakat. Untuk mengetahui ketimpangan kebutuhan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat (*community needs assesment*) dilakukan diskusi dalam bentuk *focus group discussion* yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan faktor pembatasnya serta alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Hasil kajian adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 7.

Dinamika Pembangunan dan Hubungan Antara Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Migas. Pada kasus di Desa Saliki, ekspektasi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Program Gerbang Dayaku maupun Program Gerbang Raja maupun peran perusahaan migas sebagai katalisator yang menstimulasi pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat lokal sangat besar. Terlebih pada sistem desentralisasi yang memberi peluang pengelolaan anggaran lebih besar untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, adalah wajar bila masyarakat memiliki ekspektasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, kemitraan sinergis antara pemerintah daerah dan usaha penambangan migas diharapkan masyarakat menjadi "*sponsorship utama*"

bagi fase awal pembangunan dan transformasi kemandirian ekonomi masyarakat. Untuk mencapai kemandirian tersebut dibutuhkan tahapan pembangunan yang berjenjang dan waktu yang relatif lama, sementara fase penutupan tambang (*mine closure*) adalah suatu yang pasti terjadi. Pada prakteknya, proses penutupan tambang ini dapat terjadi dalam waktu yang relatif jauh lebih cepat dari perkiraan berbagai pihak, sementara tahapan kemajuan pembangunan masih jauh dari standar yang diharapkan oleh masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan program pembangunan Gerbang Dayaku-Gerbang Raja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan program pengembangan masyarakat yang diinisiasi oleh perusahaan migas sebagai instrumen katalisator pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat menghadapi permasalahan yang kompleks di lapangan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi Program Gerbang Dayaku dan Gerbang Raja di Desa Saliki yang dilakukan oleh Pemda Kutai Kartanegara adalah: 1) kelembagaan pemerintahan daerah dan kelembagaan lokal masyarakat belum memiliki kapasitas yang memadai sehingga timbul kesenjangan pemahaman antara rencana makro pembangunan dengan penjabaran di tingkat operasional-teknis di lapangan, terutama di tingkat pemerintahan desa sebagai unit eksekusi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Konsekwensi utamanya adalah ketidakpuasan dan rendahnya partisipasi masyarakat karena ketidaksinkronan dalam

Tabel 5. Sebaran Responden berdasarkan Persepsi terhadap Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kukar (PD) dan Perusahaan Migas (PM)

Aspek Persepsi terhadap Komunikasi Publik Lembaga	Persepsi (%)					
	Negatif		Netral		Positif	
	PD	PM	PD	PM	PD	PM
Memperhatikan kebenaran pesan	65	72,5	17,5	17,5	17,5	10
Memperhatikan kesamaan hak dan kedudukan	62,5	70	17,5	20	20	10
Memperhatikan prinsip dialogis dan transparansi	62,5	70	20	20	17,5	10
Memperhatikan konteks budaya lokal	62,5	65	22,5	20	15	15
Rataan	64,25	69,375	19,375	19,375	17,5	11,25

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 6. Sebaran Responden berdasarkan Pemenuhan Ekspektasi Pembangunan oleh Pemda (PD) dan Perusahaan Migas (PM)

Ekspektasi Pembangunan	Tingkat Pemenuhan (%)					
	Rendah		Sedang		Tinggi	
	PD	PM	PD	PM	PD	PM
Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan dasar	65	82,5	30	15	5	2,5
Penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha	62,5	80	32,5	15	5	5
Jaminan hukum dan penanganan kriminalitas	65	82,5	30	15	5	2,5
Pengelolaan lingkungan hidup	72,5	80	20	15	7,5	5
Rataan	66,25	81,25	28,125	15	5,625	3,75

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 7. Hasil Kajian Kebutuhan Pembangunan oleh Masyarakat

Permasalahan	Alternatif Solusi
Sarana dan Prasarana Dasar	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada air bersih dan listrik ▪ Fasilitas sekolah kurang ▪ Fasilitas kesehatan tidak berfungsi (medis dan paramedis tidak bekerja) ▪ Fasilitas penerangan kurang ▪ Bangunan BPU desa rusak ▪ Jalan masih menumpang perusahaan ▪ Jalan berdebu dan sangat becek ketika hujan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuka peluang investasi untuk membangun sarana air bersih ▪ Memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada desa ▪ Pengawasan dan penyelesaian pembangunan fasilitas sekolah yang terbengkalai ▪ Mendorong program Gerbang Dayaku/ Gerbang Raja untuk memenuhi fasilitas pendidikan ▪ Penegasan dinas kesehatan untuk menempatkan tenaga medis dan paramedis supaya dapat melayani masyarakat ▪ Memberikan dana insentif tambahan tenaga medis dan paramedis ▪ Bekerjasama dengan perusahaan untuk membangun instalasi listrik ▪ Membangun jalan desa
Degradasi lingkungan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penebangan dan kerusakan hutan mangrove secara liar ▪ Penggundulan lahan ▪ Pencemaran lingkungan karena limbah perusahaan dan buangan kapal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reboisasi/penanaman kembali lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit ▪ Penanaman mangrove di sekitar empang dan pinggir sungai ▪ Penambahan sempadan (>10 m) di pinggir sungai ▪ Melibatkan masyarakat dalam menjaga hutan mangrove ▪ Membuat peraturan, sosialisasi dan pelaksanaan dan sanksi untuk pelaku pencemaran
Peluang kerja dan kesempatan berusaha	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang tersedia mata pencarian/peluang kerja ▪ Peluang investasi kecil ▪ Kurang kemandirian ekonomi ▪ Fasilitas penunjang ekonomi kecil kurang ▪ Pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang ▪ Sistem KKN dalam penerimaan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempermudah investor masuk dengan jaminan keamanan untuk membuka lapangan kerja baru ▪ Kejelasan status lahan untuk kepastian berusaha ▪ Kerjasama/kemitraan dengan perusahaan setempat ▪ Membangun kesepakatan bersama untuk membangun usaha kelapa sawit yang saling menguntungkan ▪ Sosialisasi terhadap konsep kemitraan mengenai peminjaman dana ▪ Pengelolaan dana (lembaga pengelolaan, ekonomi desa) ▪ Transparansi peluang kerja (bekerja) dengan pengawasan oleh pihak Depnaker
Sumber daya manusia	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyak pengangguran ▪ Upah kerja rendah ▪ Pendidikan dan keterampilan kurang ▪ Pengalaman kerja kurang ▪ Adanya PHK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penegasan standar upah tenaga kerja ▪ Mengutamakan warga lokal menurut kemampuan untuk bekerja ▪ Memberikan keterampilan dan pendidikan bekerja dan usaha (kursus dan pelatihan) ▪ Perlu pendampingan dan pembinaan usaha yang berkelanjutan ▪ Dialog terhadap perusahaan tentang kebijakan PHK
Kerjasama dan hubungan antar komponen masyarakat	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tumpang tindih lahan (perusahaan dengan masyarakat) ▪ Pemerintah kurang transparan dalam program pembangunan ▪ Kesadaran sosial masyarakat kurang ▪ Kurang saling menghormati antar masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesepakatan/paham bersama terhadap batas-batas ▪ Ada tanda-tanda batas areal perusahaan lengkap dengan bukti hukum kepemilikannya ▪ Kejelasan informasi pembangunan yang disampaikan ke masyarakat ▪ perbaikan pelayanan masyarakat oleh Pemda ▪ Perlu keteladanan dari pemimpin / tokoh masyarakat dan Pemda
Masalah sosial dan kriminalitas	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miras dan narkoba ▪ Judi ▪ Kenakalan remaja/pergaulan bebas ▪ Kurang bimbingan agama ▪ prostitusi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi dari aparat kepolisian tentang bahaya miras dan narkoba ▪ Mengaktifkan kegiatan-kegiatan pemuda ▪ Peraturan desa dan memberikan sanksi ▪ Adanya sanksi sosial yang tegas dan bijak ▪ Bimbingan dan pengawasan orang tua dan lingkungan

Lanjutan Tabel 7. Hasil Kajian Kebutuhan Pembangunan oleh Masyarakat

Permasalahan	Alternatif Solusi
Usaha perekonomian rakyat:	
Tambak udang tradisional/empang	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bibit mahal dan cepat mati ▪ Masalah kualitas air ▪ Masalah teknis budidaya tambak ▪ Keterbatasan dan ketergantungan modal ▪ Kurang penyuluhan dan pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengadaan induk yang bermutu di <i>hatchery</i> ▪ penyuluhan teknis (<i>dempond</i>) dan pendampingan yang tuntas ▪ teknis budidaya yang ramah lingkungan ▪ alat pendeteksi air (pengadaan alat tersebut) ▪ magang kerja ▪ kredit lunak (pinjaman)
Penangkapan ikan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang alat tangkap ▪ Hasil tangkapan menurun ▪ Penggunaan alat tangkap yang merusak (strum dan trawl di sungai) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu alat tangkap modern dan armada yang baru ▪ Pelarangan dan sanksi tegas untuk pihak-pihak terlibat penggunaan alat yang dilarang ▪ Pengawasan oleh satgas masyarakat dan aparat
Budidaya air tawar	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya pengalaman ▪ Kurangnya penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Magang kerja, membuat kolam percontohan dengan pendampingan teknis ▪ Keramba air deras di Sungai Balok
Peternakan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bibit tidak tersedia ▪ Masalah modal ▪ Masalah pencurian ternak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan ditujukan bagi yang sesuai kebutuhan pekerjaan dan punya pengalaman ▪ Ada mekanisme penyaluran bantuan yang adil ▪ Pengkandangan ternak sapi
Perkebunan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan perkebunan tidak dikelola ▪ Hasil menurun ▪ Tidak ada modal ▪ Sulit pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aturan pengelolaan lahan perkebunan ▪ Pemulihan status lahan tidur ▪ Peremajaan tanaman ▪ Kelembagaan ekonomi desa
Pemasaran produk/perdagangan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemasaran komoditi sulit ▪ Harga komoditi turun ▪ Sistem ijon yang memberatkan petani 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga mitra perdagangan/penampung hasil yang sama-sama menguntungkan dan pengembangannya dibantu perusahaan ▪ Perlu dibangun jalan desa ▪ Butuh bimbingan peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil

Sumber: Data primer diolah

melihat kebutuhan pembangunan; 2) status hukum kawasan Delta Mahakam yang belum pasti menimbulkan pemahaman atas pengelolaan sumberdaya yang tidak seragam di antara stakeholder yang ada. Kasus hukum yang melibatkan beberapa tokoh utama pemerintah daerah berpengaruh menimbulkan tarik menarik kepentingan di tingkat akar rumput atas hak pengelolaan sumberdaya di kawasan tersebut dan sering kali bersifat kontraproduktif atas dengan Program Gerbang Dayaku.

Sedangkan permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi kegiatan pengembangan masyarakat yang diinisiasi erusahaan migas di Desa Saliki adalah: 1) program seringkali dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan (*charity*) yang belum memacu keswadaayaan masyarakat, tetapi justru mendorong

ketergantungan masyarakat. Secara konseptual program dapat saja dirancang untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan, tetapi pada implementasinya program yang dikembangkan seringkali berdurasi pendek dan bersifat parsial sehingga ketika program berakhir masyarakat belum mampu meneruskan sektor usaha secara mandiri. Padahal dalam jangka panjang, yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah pengembangan sektor usaha yang berkelanjutan; 2) dalam persepsi masyarakat, perusahaan seringkali mendudukkan program pengembangan masyarakat dalam konteks pemberian bantuan sebagai kunci utama dalam menghadapi persoalan dengan masyarakat, sementara di sisi lain perusahaan belum optimal membangun komunikasi publik yang intensif dan dialogis dengan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kepedulian perusahaan migas yang telah dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan masyarakat perlu lebih diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan dukungan pengembangan ekonomi produktif. Bantuan pelatihan yang diberikan hendaknya tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga meliputi pendampingan aspek manajemen usaha sampai pada fase keswadayaan usaha. Dalam meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, peran perusahaan migas (korporat) dalam pembangunan prasarana transportasi, layanan kesehatan dan sanitasi lingkungan serta pemulihan kerusakan lingkungan masih diperlukan. Efektivitas program pengembangan masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui rangkaian proses yang melibatkan masyarakat secara utuh melalui forum komunikasi dan kemitraan. Dari pengalaman yang ada forum-forum yang dibentuk seringkali tidak berfungsi dengan baik karena beberapa masalah antara lain: keanggotaan forum yang kurang representatif, kompetensi anggota forum yang kurang memadai, tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana operasional forum, serta tidak tersedianya fasilitator dan nara sumber yang berkompeten untuk membantu forum dalam membahas masalah yang dihadapi.

Pada sisi pemanfaatan kawasan delta yang lain, pada dasarnya konversi hutan mangrove (deforestasi) menjadi lahan tambak berdampak positif terhadap penduduk Desa Saliki, minimal dalam jangka pendek. Usaha tambak memberikan alternatif di tengah minimnya lapangan kerja bagi penduduk asli Desa Saliki maupun penduduk pendatang yang terutama berasal dari Sulawesi Selatan. Pada masa awal, tambak juga mempunyai kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Stakeholders utama yang langsung berkaitan dengan kegiatan tambak adalah pengusaha tambak yang sekaligus sebagai pedagang pengumpul udang (pongawa/*patron*) yang umumnya berasal dari luar desa dan masyarakat lokal sebagai petambak pemilik dan penyakap (*client*). Pongawa mempunyai peran yang sangat signifikan dan keterlibatannya sangat dominan dalam perkembangan usaha tambak di Desa Saliki maupun wilayah Delta Mahakam secara keseluruhan. Mereka menguasai dan/atau memiliki tambak yang sangat luas sampai ratusan hektar. Pongawa juga mempunyai kontrol yang sangat kuat dan dengan modal dan akses yang dimiliki dapat meningkatkan lahan tambaknya seluas mungkin dan mengatur usaha tambak dan hasil tambak 'anak buah'-nya (*client*) yaitu petambak pemilik maupun penyakap yang mendapatkan fasilitas modal dari pongawa.

Di sisi lain, pemilik dan pengelola tambak-tambak di delta Mahakam hampir sebagian besar lebih tidak

memiliki pengetahuan yang cukup tentang tambak. Mereka hanya melakukan usaha pertambakan hanya dengan peniruan atau membawa pengetahuan dari daerah asal (Sulawesi Selatan) yang kondisi alamnya mungkin tidak begitu cocok jika diterapkan dengan cara pertambakan yang sama. Pertambakan yang dilakukan pada saat ini hampir tidak lebih daripada ladang berpindah seperti pada pertanian padi gunung. Lahan tambak dibuat tak teratur tanpa ada saluran air, dan dibuat pula seluas-luasnya, sehingga menyulitkan dalam pengelolaan tambak seperti pengeringan, pencucian, pemupukan dan pengapuran, penanganan kualitas air, dan masalah teknis lainnya.

Secara umum, masalah-masalah utama yang terdapat pada pertambakan di Delta Mahakam adalah: 1) Pelaku tidak menguasai pengetahuan dan ketrampilan pertambakan yang baik dan benar, dalam hal ini meliputi: pengetahuan tentang lingkungan pertambakan, luasan pertambakan yang ideal, tata letak, pengelolaan tanah dasar tambak, pengelolaan kualitas air, pemilihan bibit, pengetahuan tentang penyakit, dan pengetahuan tentang produk udang yang bisa diterima masyarakat internasional; 2) Lemahnya fasilitasi dan pendampingan Pemerintah daerah dalam hal penyusunan tata guna lahan pertambakan yang sesuai dengan sistem ekologis dan ekonomis sehingga usaha pertambakan berkembang secara tidak efektif dan efisien. Kebutuhan pendampingan dan penyuluhan untuk praktek – praktek penyelenggaraan budidaya tambak yang kompetitif dan ramah lingkungan juga tidak bisa diberikan dengan baik; 3) Rendahnya perhatian dari organisasi di luar pemerintah, seperti Organisasi Non Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam memperhatikan dan memberikan dukungan kepada masyarakat petambak untuk lebih meningkatkan produksi tambak, tetapi sekaligus juga lebih memperbaiki lingkungan tambaknya.

Fakta juga menunjukkan bahwa program pemulihan ekosistem yang diinisiasi oleh pemerintah dan perusahaan swasta tidak diikuti oleh partisipasi yang berkelanjutan dari masyarakat sehingga dapat dikatakan rendah tingkat keberhasilannya. Rencana dari Pemda Kukar untuk membuat komposisi 60 : 40 untuk luasan mangrove dan tambak tampaknya baru terbatas pada wacana yang belum tereksekusi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya rencana rehabilitasi ekosistem mangrove dengan cara melakukan penanaman kembali (revegetasi) seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem karena beban eksploitasi yang melebihi daya dukung lingkungan yang tersedia. Akhirnya ini pendapatan petambak cenderung mengalami penurunan karena menurunnya produktivitas lahan dan semakin seringnya terjadi kegagalan produksi akibat

serangan penyakit. Pola relasi produksi *patron-client* yang terjadi juga belum mampu menggerakkan motor perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini diindikasikan dengan masih banyaknya penduduk yang mengganggu ataupun bekerja di sektor-sektor informal.

Sampai saat ini usaha tambak di Desa Saliki, Delta Mahakam, masih terus berkembang secara agresif tanpa kontrol dari pihak pemerintah yang berwenang. Karena itu perluasan tambak seringkali memasuki wilayah yang menjadi lokasi atau di sekitar perusahaan migas. Lokasi perusahaan migas juga sangat berdekatan dengan permukiman penduduk. Masing-masing pihak sering kali terganggu dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain. Petambak dan penduduk mengklaim terjadinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan migas, dan sebaliknya perusahaan migas menyatakan kegiatan tambak memasuki lokasi migas yang dapat mengganggu kegiatan perusahaan dan kelestarian delta. Konflik kepentingan antar *stakeholders* ini telah memicu protes-protes, terutama dari pihak ponggawa, petambak, dan kelompok masyarakat lain. Penyelesaian yang biasa dilakukan biasanya pemberian kompensasi dari pihak perusahaan migas atau dengan penyelesaian hukum.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan pembangunan tersebut, pemberdayaan masyarakat di kawasan Delta Mahakam perlu menekankan pentingnya kualitas partisipasi komunitas lokal, baik pada tahapan perencanaan program, pelaksanaan maupun tahap pengembangannya. Perspektif pemberdayaan ini tidak memisahkan antara pembangunan infrastruktur fisik dengan pengembangan modal sosial masyarakat. Sumber dana bagi program pemberdayaan ini didasarkan pada prinsip "*power sharing*" yang berasal dari kontribusi alokasi anggaran pemerintah (pusat dan daerah), kontribusi pihak swasta (perusahaan migas) dan dari partisipasi masyarakat sendiri. Kelemahan yang ditemukan di lapangan adalah pendanaan pengembangan masyarakat dilakukan secara parsial oleh masing-masing stakeholder. Tidak ada sinergi antara proses identifikasi ekspektasi pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan implementasi program pembangunan pemerintah maupun dengan program pengembang masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan migas. Sementara itu, kualitas dari partisipasi masyarakat itu sendiri nyaris tidak mendapat perhatian. Hampir tidak ada forum komunikasi reguler yang menjadi ruang sosial dan mengedepankan proses dialogis antara stakeholder maupun antar aras dengan agenda pembahasan yang tersosialisasi dengan baik.

Dalam konteks tersebut, konsepsi pembangunan khususnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan melalui pendekatan dari bawah (*bottom up approaches*) adalah alternatif pendekatan yang potensial

mampu menjembatani persoalan tersebut. Pendekatan pengelolaan sumberdaya berbasis partisipasi masyarakat akan memberi proporsi rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap lingkungan yang kuat sehingga proses pengambilan keputusan memiliki dukungan/legitimasi yang kuat dan pada tahap selanjutnya akan membangun efektifitas operasionalisasi program penguatan ekonomi masyarakat. Pada hakekatnya, pendekatan pembangunan partisipatif ini memberi ruang gerak yang cukup pada proses "*power sharing*" agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya. Oleh karena itu, diperlukan itikad dari semua stakeholders sebagai pelaku perubahan dalam memberdayakan masyarakat dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya baik di tingkat individu, keluarga maupun kelompok-kelompok sosial di dalamnya guna mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian upaya pemberdayaan merupakan upaya menumbuhkan peran serta dan kemandirian sehingga masyarakat baik di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki akses pada sumberdaya, kesadaran kritis sehingga mampu melakukan pengorganisasian/kontrol sosial atas aktivitas pembangunan yang dilakukan di lingkungannya.

4. Simpulan

Secara umum, persepsi masyarakat terhadap program pembangunan Gerbang Dayaku yang dilakukan oleh Pemda Kutai Kartanegara dan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan migas berdasarkan tiga aspek (pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi dan SDM serta komunikasi publik) secara mayoritas menunjukkan persepsi negatif, kemudian diikuti oleh persepsi netral dan positif. Demikian pula berlaku pada pemenuhan ekspektasi masyarakat atas kebutuhan pembangunan pada kedua lembaga tersebut, mayoritas berada pada level yang rendah.

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Program Gerbang Dayaku – dan Gerbang Raja adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan kelembagaan masyarakat lokal dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal. Sedangkan permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi kegiatan pengembangan masyarakat yang diinisiasi perusahaan migas adalah desain dan implementasi program belum mampu memacu keswadaayaan masyarakat. Selain itu masih berkembang dalam persepsi masyarakat bahwa program pengembangan masyarakat adalah strategi temporer perusahaan dalam menghadapi persoalan dengan masyarakat. Sejauh ini belum terbangun format hubungan antar stakeholder yang operasional dan efektif sebagai media komunikasi reguler yang menjadi

ruang sosial dan mengedepankan proses dialogis antara stakeholder maupun antar aras untuk bersama-sama mencari solusi permasalahan pembangunan yang ada.

Penguatan kelembagaan masyarakat dan komunikasi dialogis sebagai basis strategi pemberdayaan.

Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi sehingga komponen masyarakat dapat berpartisipasi secara utuh sebagai mitra pengimbang kegiatan-kegiatan pembangunan yang berjalan sekaligus unit-unit usaha produktif yang menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu perlu dikembangkan iklim komunikasi pembangunan antar stakeholder yang dialogis dengan memperhatikan prinsip-prinsip keterbukaan dan kesetaraan, akses informasi yang cepat dan terpercaya serta respon yang cepat terhadap umpan balik yang disampaikan.

Daftar Acuan

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rhineka Cipta. Jakarta.

Asngari, Pang S. (1984). *Persepsi Direktur penyuluhan Tingkat Karesidenan dan Kepala Penyuluhan Pertanian terhadap Peranan dan Fungsi Lembaga Penyuluhan Pertanian di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat*. Media Peternakan, Volume Nomor 2. Bogor: Fakultas Peternakan IPB.

Atkinson, R.C. & Hilgard, E.R. (1991). *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Erlangga.

Bappeda Kutai Kartanegara, (2002). *Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Delta Mahakam*. Bappeda Kutai Kartanegara, Tenggarong.

Bappeda Kutai Kartanegara, (2010). *Profil Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010*. Bappeda Kukar. Tenggarong.

Bourgeois, et al. (2002). *A Socio Economic and Institutional Analysis of Mahakam Delta Stakeholders*. Final Report to Total Finaelf. PT WIN and CIRAD. Balikpapan, East Kalimantan.

Budimanta, A, Prasetijo, A., Rudito, B. (2004) *Corporate Social Responsibility Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. ICSD. Jakarta

Harihanto, (2001). *Persepsi, Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Air Sungai (kasus di DAS Kaligarang, Jawa Tengah*. [Disertasi]. Program Pascasarjana IPB. Bogor.

Hidayati, D., et al. (2004). *Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Delta Mahakam*. LIPI, Indonesia.

Pemda Kutai Kartanegara, (2005). *Vitalisasi dan Aktualisasi Gerbang Dayaku: Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara*. Tenggarong. 72 hal.

Rakhmat, J. (1997). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sidik, A.S, et al. (2005). *Studi Produktivitas Tambak di Kawasan Delta Mahakam*. FPIK UNMUL dan TOTAL E&P INDONESIA. Balikpapan.